

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan di perhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD. Dimana dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya, sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien ,tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu factor yang harus di perhatikan. Namun demikian , tahap persiapan atau

penyusunan anggaran harus di akui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses anggaran daerah tersebut.

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,khusus nya dalam pembiayaan umum.

Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua,yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan ,yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja modal

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana Penyusunan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan alasan tersebut penulis memilih judul Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut

“ Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada RSUP DR.M.DJAMIL Padang, Sumatera Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam laporan magang ini,yaitu:

1. Bagaimana penyusunan belanja langsung pada RSUP DR.M.DJAMIL Padang, Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan belanja langsung pada RSUP DR.M.DJAMIL Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Dan sebagai penilaian terhadap prosedur penyusunan belanja langsung pada instansi terkait.
2. Bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan atau masukan dn sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untul melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran.
3. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gambaran pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk lebih terarahnya penulis Laporan magang ini, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Magang, Tempat dan Waktu Magang dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Fungsi-fungsi APBD, Prinsip Anggaran Daerah, Struktur APBD dan Prosedur Penyusunan APBD.

BAB III Pembahasan

Gambaran umum tentang RSUP DR.M.DJAMIL Padang, yang terdiri dari sejarah berdirinya, Visi dan Misi RSUP DR.M.DJAMIL Padang. Membahas tentang penyusunan belanja langsung pada RSUP DR.M.DJAMIL Padang dan analisis

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang